



► PERUBAHAN APBD 2025

Pendapatan dan Belanja di Pemda DIY Turun

DANUREJAN—DPRD dan Pemda DIY menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD DIY, Budi Waljiman, menyampaikan dalam perubahan APBD tersebut terdapat sejumlah penyesuaian signifikan, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan.

"Jumlah pendapatan daerah semula Rp5,02 triliun berkurang Rp265,22 miliar menjadi Rp4,76 triliun. Sementara, belanja daerah semula Rp5,23 triliun juga turun Rp199 miliar menjadi Rp5,03 triliun," ujarnya dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DIY, Kamis (17/7).

Dari sisi pembiayaan, penerimaan daerah meningkat dari Rp319 miliar menjadi Rp437 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan meningkat dari Rp108 miliar menjadi Rp160 miliar. Dengan demikian, pembiayaan netto setelah perubahan mencapai Rp277 miliar dan tidak terdapat sisa lebih pembiayaan.

Selain menyampaikan rincian angka, Banggar DPRD DIY juga meminta Pemda DIY memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 72/2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, khususnya terkait belanja keuangan Aparatur Sipil Negara.

DPRD juga meminta laporan pertanggungjawaban yang rinci terhadap pelaksanaan belanja modal, terutama untuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Pemda DIY diharapkan dapat melakukan efisiensi belanja agar mampu memenuhi porsi belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen, sesuai ketentuan perundang-undangan," kata Budi.

Prioritas alokasi anggaran juga perlu diarahkan untuk mendukung pencapaian target utama Gubernur DIY, termasuk penurunan kemiskinan, pengangguran terbuka, ketimpangan wilayah, dan peningkatan indeks kebudayaan.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengapresiasi DPRD DIY atas proses pembahasan yang berjalan dengan baik. "Saya menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada pimpinan Dewan, seluruh fraksi, komisi, dan Badan Anggaran DPRD DIY atas dedikasi, ketekunan, dan sikap arif selama proses pembahasan," ujar Sultan.

Sultan berharap proses evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dapat berjalan lancar, sehingga perubahan APBD 2025 bisa segera ditetapkan dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan DIY tahun depan. (Arlq Fajar Hidayat)